

■ PLTA

Persuasi di Koto Panjang

Menghindari terulangnya kasus Waduk Kedungombo, OECF belum mau mencairkan bantuannya untuk pembangunan PLTA Koto Panjang, Riau.

PEMBANGUNAN PLTA Koto Panjang, Riau, tak semulus yang direncanakan. OECF (Overseas Economic Corporation Fund), sebagai lembaga penyandang dana, belum mau mencairkan bantuan pembangunan proyek pembangkit tenaga listrik berkapasitas 114 megawatt, yang diharapkan rampung 1996 mendatang.

Keengganan lembaga keuangan pemerintah Jepang yang menanganai bantuan alians pinjaman resmi bilateral (*bilateral official development assistance*) ini, bukan karena proyek itu tak menguntungkan, tapi karena pemerintah (PLN) belum berhasil memenuhi persyaratan yang diajukan oleh penyandang dana ini.

Ada tiga syarat yang diajukan OECF agar dana sebesar 290 juta dolar AS tersebut bisa cair. Pertama, seluruh kepala keluarga (KK) yang akan digisuk harus menyatakan kesediaannya secara individual — tidak cukup hanya persetujuan pemuka masyarakat setempat — untuk pindah tempat lain. Kedua, dalam inventarisasi dan penetapan nilai ganti rugi, rakyat harus diikutsertakan dalam menetapkan harganya — tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah saja. Ketiga, seluruh sawah liar, khususnya 30 ekor gajah yang hidup di kawasan bakul waduk itu, harus ditangani secara baik dan tidak boleh dimusnahkan.

"OECF mau mencairkan dana bantuan yang direncanakan itu, kalau semua penduduk bersedia dan mereka mau dipindahkan," ujar Katsuki Oda, salah seorang *representative* OECF di Jakarta. Persyaratan OECF ini sejalan dengan keinginan penduduk. "Seharusnya kami tahu dulu besar ganti rugi yang akan diterima, baru kami bersedia pindah. Hingga sekarang kami belum tahu berapa besar ganti rugi tersebut," tutur N. Idris, sekretaris desa Tanjung Paub, salah satu desa yang akan dilenggelamkan.

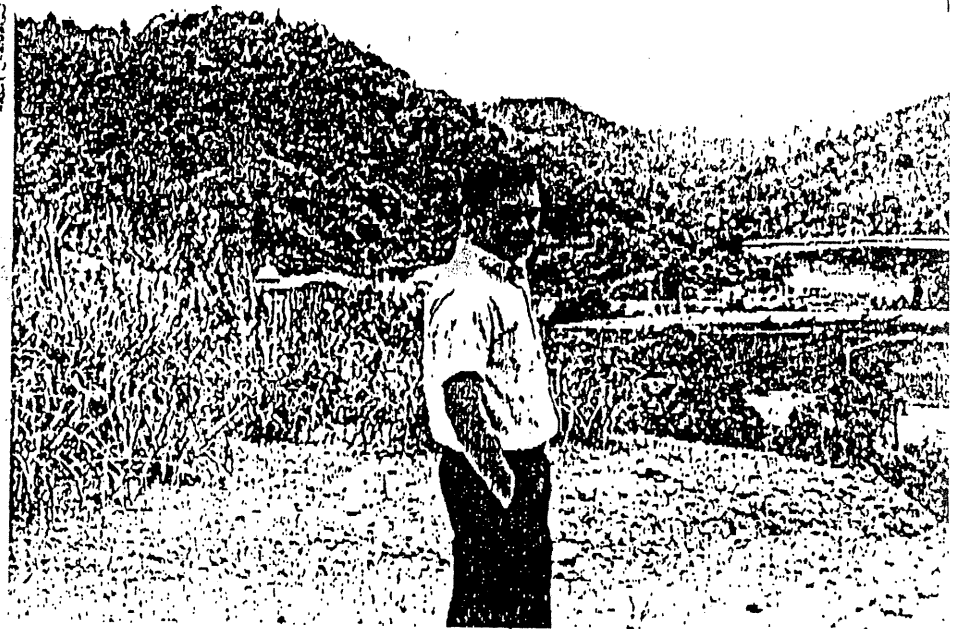
Kepedulian OECF terhadap masyarakat yang bakal tergusur ini bisa dimengerti. Sebab, untuk keperluan pembangunan waduk penampung air seluas 12.400 hektare yang akan menampung aliran sungai Kampar ini, harus menenggelamkan sepuluh desa, masing-masing delapan desa di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau, dan dua desa di

Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Kontan, sekitar 4.000 KK atau sekitar 16.000 penduduk harus hijrah meninggalkan tanah leluhur mereka. Dan kenyataan ini sudah disadari penduduk. "Tak ada pilihan lain, kami memang harus pindah kampung," ujar Kadir, 63, penduduk desa Tanjung Paub.

Bila hanya memindahkan penduduk saja, Pemda tak menemui kesulitan. Lokasinya sudah tersedia. Untuk delapan desa di daerahnya, Pemda Riau telah menyediakan tiga lokasi, masing di Ranah Koto

cukup strategis. "Kita akan siapkan tanah matang dan perumahan serta seluruh fasilitas pelayanan umum," janji Bupati Kabupaten Kampar, Saleh Djasid, ST. Saleh juga menjanjikan, di lokasi pemukiman baru itu penduduk yang bedol desa akan ditempatkan berdasarkan desa asal masing-masing. "Permittaan masyarakat — mereka tetap ingin mempertahankan struktur sosialnya — kita akan kabulkan," kata Saleh.

Yang membuat Pemda dan PLN pusing, adalah soal ganti rugi tadi. Mau tak



H. TUNJUNG WICAKSONO di lokasi PLTA KOTO PANJANG. Tak mulus.

Sitam seluas 1.970 hektare, di Selatan Sibiruang 8.400 hektare, dan di daerah Selatan Muara Takus seluas 7.600 hektare. Ketiga lokasi tersebut terletak di Kecamatan XIII Koto Kampar. Sementara itu, untuk dua desa di daerah 50 Kota, Pemda Sum-Bar juga telah menyediakan pemukiman baru di Rimbo Datar seluas 10.000 hektare.

Rencananya, masing-masing KK akan mendapat dua hektare untuk kebun dan 0,25 untuk rumah dan pekarangan. Penempatan baru tersebut, setelah di survei oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup, Universitas Riau dan Universitas Andalas, Padang, tanahnya cukup subur dan lokasinya juga

semua prosesnya harus memakai cara tawar-menawar. Sedangkan, dana untuk ganti rugi ini jumlahnya sudah dibatasi — menurut sumber PROSPEK — hanya Rp 35 miliar. Tentu, jumlah ini tak akan cukup. Bayangkan saja, PLN harus membayar ganti rugi sekitar 3.000 rumah dan bangunan lainnya, serta dua juta batang pohon karet yang selama ini dijadikan sumber penghasilan penduduk. "Untuk pohon karet, penduduk minta ganti rugi Rp 20 ribu per batang," tutur N. Idris.

Tampaknya, Pemda setempat tidak berniat menggunakan cara paksa untuk memecahkan masalah ini. Pendekatan persuasif kelihatannya lebih diutamakan. Seba-

gai langkah awal, Bupati Kampar telah membentuk sembilan tim beranggotakan 130 orang. "Tim ini secara teratur turun ke desa-desa, melakukan dialog dengan penduduk," tutur Saleh Djasid. Hal ini diakui oleh N. Idris. "Tidak ada tekanan atau intimidasi," ujarnya. Hanya, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pemuka masyarakat desa Tanjung Balit: ketika ada seorang pemuka masyarakat yang meminta agar janji Pemda tersebut dibuat secara tertulis, pemuka masyarakat tersebut dimarahi sang pejabat.

Selain akan menenggelamkan kesepuluh desa, proyek ini juga akan melenyapkan sekitar 49 kilometer jalan negara dan provinsi yang menghubungkan Padang-Pekanbaru. "Tahun ini sebagian jalan pengganti akan kami selesaikan, sehingga ketika pekerjaan utama dimulai, hubungan darat Sumbar-Riau tidak terputus," ujar Lt. Tunjung Wiljakkono, kepala proyek PLTA Koto Panjang tersebut.

kependudukan, lingkungan dan pemindahan penduduk (*resettlement*) sebagai pertimbangan untuk memberikan pinjaman dalam suatu proyek pembangunan. Pembangunan biasanya mengorbankan orang. Kami harus mempertimbangkan korban itu".

Itulah sebabnya, Pemda setempat ekstra sabar dan hati-hati menangani masalah ini. Setelah terlambat sekitar dua bulan dari jadwal semula. Sejak Februari lalu, Pemda dan PLN sudah mulai mengumpulkan tunda tangan para KK. "Sekarang, tunda tangan mereka sudah kita kantong," ujar Lt. Syahril Amir, kepala PLN Pembangkit Induk & Jaringan (Pikiting) Sumbar-Riau. "Semua kita saya kira tak ingin kasus Kedungombo terulang lagi," tambah Syahril.

Syahril menargetkan, in-

gan yang berhak".

Tidak hanya mengurus penduduk. Pemindahan 30 gajah yang menghuni kawasan tersebut, juga akan segera dilaksanakan. "Kita akan pindahkan ke habitatnya yang baru di Giam Siak, dekat seko-



SALEH DJASID. Tak ada intimidasi.

lah gajah di Sebang, Duri, Riau," tutur Syahril.

Untunglah, pihak OECF tidak membatasi waktu penyelesaian masalah ini. Oda menjelaskan, selama ini OECF tidak pernah mendesak *executing agency* untuk menyelesaikan masalah ini. "Kami tidak punya target kapan soal ini harus diselesaikan. Kami hanya menunggu *progress report* dari PLN," ujar Oda.

Lalu, bagaimana bila masalah *resettlement* tidak bisa diselesaikan dan tunda persetujuan penduduk tidak diperoleh? Apakah dana bantuan tersebut tetap dicairkan? "Sukar untuk menjawab pertanyaan itu sekarang. Saya belum tahu," jawabnya.

Kerjasama pemerintah RI dengan OECF sudah cukup lama. Selama ini pemerintah sudah memanfaatkan pinjaman lembaga ini untuk bidang elektrifikasi, transportasi, telekomunikasi, pertanian, perikanan, dan pengadaan air bersih. Menurut Laporan Tahunan OECF, di bidang kelistrikan, 31% dari seluruh kapasitas instalasi listrik Indonesia dibiayai oleh lembaga ini. OECF juga membiayai 14% dari keseluruhan jalan kereta api, dan 19% dari total pembangunan jalan raya.

Menurut Katsuki Oda, dari semua proyek yang dibantu OECF, belum pernah ada pengalihan seperti Koto Panjang ini, yakni penundaan pencairan dana. "Kasus ini kasus yang kami alami pertama kali," ujarnya. Dengan adanya 'tekanan' OECF ini, semoga masyarakat Koto Panjang tak mengulang pengalaman pahit saudara mereka di Kedungombo, Ja-Teng.

Aswadi Munir, Hasil Chaniago, & Suwardi



JUNG OMBO. Belum tuntas juga.

rsyaratan yang diajukan OECF itu yang tidak biasanya. Oda sendiri menilai, bahwa cara seperti baru pertama kali pakai di Indonesia. Sikap OECF menurut Oda, dilhami oleh meledak-kasus Kedungombo, Ja-Teng, yang al saat ini belum tuntas jua. "Sikap akan merupakan sikap OECF sejak melainkan muncul bersamaan deng-mbulnya kesadaran di masyarakat berkembang. Yaitu, kesadaran bah-emangunan harus mempertim-in masalah lingkungan dan sosial," lu.

k itu, kata Oda, OECF mengang-lu memasukkan masalah-masalah

ventarisasi sudah bisa selesai sebelum April mendatang. Pertengahan April, direncanakan dilakukan pertemuan dengan para wakil masyarakat delapan desa di Kabupaten Kampar untuk menentukan standar harga ganti rugi. Sedangkan, dengan wakil-wakil dua desa di Kabupaten 50 Kota dijadwalkan 5 Mei mendatang.

> Kepala Proyek PLTA Koto Panjang, Lt. Tunjung Wiljakkono, menegaskan. Dalam pembangunannya proyek ini, tidak akan terjadi penelantaran penduduk. "Kami akan berusaha membicarakan soal ganti rugi dan angka-angkanya secara terbuka," ujarnya. Dana ganti rugi yang disepakati nanti, katanya, "Akan diserahkan langsung ke tan-

コトパンジャン水力発電プロジェクト

コトパンジャン・ダムの説得力

クドゥン・オンボ・ダム貯水池の問題を繰り返さないために、OECEは、リアウ州でのコトパンジャン水力発電プロジェクトの建設については、未だ援助資金の支出を行おうとしていない。

リアウ州におけるコトパンジャン水力発電プロジェクトの建設は、計画スケジュール通りには進んでいない。114メガワットの発電施設能力を有するプロジェクトの建設については、1996年に完工が予定されているのであるが、融資機関としてのOECE(海外経済協力基金)は、未だ援助資金の支出を行おうとしていない。

二国間政府開発援助のうちで借款を取り扱う日本政府の融資機関が支出を拒んでいるのは、このプロジェクトに有益性の点で問題があるというのではなく、この融資に関して要求されている前提条件が、インドネシア政府(PLN)によって未だ充足されていないからである。

2億9,000万ドル相当の援助資金が支出可能となるためには、OECEによって付せられた3条件が存している。第一に、立ち退きの対象となっているすべての世帯主(kepala keluarga)が、他の場所に移転する用意がある旨を、個別的に——単に同地の社会共同体の指導者の同意だけでは十分ではない——表明しなければならない。第二に、補償金の支払いのための目録作成と実施にあたっては、住民は、価額評価の決定過程に参加しなければならない——政府の側のみで一方向的に定められてはならない。第三に、ダム貯水池の予定地域に生存するすべての野生動物、特に30頭の象が、良好に取り扱われ、絶滅させられてはならない。

「すべての住民が、移転することを受け入れ、また彼等が、それを望むのであれば、その場合にはOECEとしては、計画通りに援助資金の支出を行うつもりである」というのが、OECEジャカルタ事務所の代表の一人であるKatsuki Oda氏の見解である。OECEによって求められているこの前提条件の充足は、住民の希求の線に沿うものである。「本来ならば、私達がどの程度の補償金を受け取れるのかが、まず最初に私達に知らされるべきです。それによって、はじめて私達としては移転する用意があるかどうかが決められるのです。今日に至るまで、私達には、どの程度の補償金額が支払われるのかが、未だ知らされていないのです」というのが、水没予定の村々の一つであるタンジュン・パウ村の村書記のN・イドゥリス氏の言い分である。

OECEが社会共同体の崩壊について懸念していることについては、これを理解することができる。なぜなら、カンバル川の流れを堰き止めて、1万2,400ヘクタールの広さの面積を有するダム貯水池を造成する必要があるために、10ヵ村、つまりリアウ州カンバル県ディガブラス・コト・カンバル郡の8ヵ村と西スマトラ州リマプル・コタ県パンカラン・コト・バル郡の2ヵ村が、それぞれに水没させられなければならないからである。そのために、およそ4,000世帯、約1万6,000人の住民が、彼等の先祖伝来の土地から離れて移転しなければならないのである。そして、当地の住民は、この事実をすでに認識しているのである。「他に選択の余地はありません。私達が故郷を離れて移転しなければならないのは確かです」と、タンジュン・パウ村の住民カディル氏(63歳)は言う。

住民を移転させることだけであるならば、地方政府にとっては、それほど難しいことではない。移

住地は、すでに用意されている。当該地域の移転対象の8ヵ村のために、リアウ州の地方政府は、すでに三つの移住地、つまり1,970ヘクタールの面積規模のラナ・コト・シラム、8,400ヘクタールの南シベルアン、7,600ヘクタールの南ムアラ・タクスを用意している。これらの三つの移住地は、ティガブラス・コト・カンパル郡に位置している。他方において、リマプル・コタ県地域の2ヵ村のためにも、西スマトラ州政府はまた、1万ヘクタールの面積規模のリンボ・ダタの新移住地を、すでに用意している。

移住計画によれば、各々の世帯には、2ヘクタールの農園と0.25ヘクタールの宅地／庭地が提供されるであろう。かかる新移住地の収容能力については、リアウ大学の環境調査センターとパダンのアンダラス大学によってすでに調査が実施されており、土地的には十分な肥沃度があり、また場所的にも十分に戦略的であるという調査結果が出されている。「我々は、豊かな土地と住居、さらにすべての公共サービス施設を用意するであろう」というのが、カンパル県知事のサレー・ジャシッドの約束である。サレー・ジャシッドはまた、全村移転方式の採用により、新移住地では、住民は、それぞれの旧村ベースに配置されるであろう旨を約束する。「住民の要望 — 彼等は、社会的構造を維持できることを、一貫して望んでいる — については、我々は、それを受け入れるつもりである」と、サレー・ジャシッドは言う。

地方政府とPLNにとっての頭痛の種は、先に触れた補償の問題である。好むと否とにかかわらず、その決定プロセスにおいては、価額交渉という方法が採られざるを得ない。他方で、この補償のための資金額は限られており、— 『アロスペク』誌の情報入手源によれば — 総額で350億ルピアにすぎない。このような総額では十分でないことは確かである。大雑把に眺めただけでも、PLNは、およそ3,000軒の家屋とその他の建物、さらにこれまでに当地の住民の収入源となってきた200万本のゴム樹に対して補償金を支払わなければならないのである。「ゴム樹については、住民は、1本当たり2万ルピアの補償を要求している」と、N・イドゥリス氏は言う。

現地の地方政府は、この問題を解決するにあたって、強制的な方法を行使するつもりはないように見受けられる。むしろ説得的なアプローチが重視されているように見受けられる。最初の措置として、カンパル県知事は、すでに130名のメンバーで構成される9チームを組織した。「このチームは、定期的に村々を訪れ、住民と対話を行う」と、サレー・ジャシッドは言う。この事実は、N・イドゥリス氏によっても認められており、「圧力または威嚇はない」と、彼は言う。ただし、タンジュン・バリット村の住民指導者の一人からは、次のような見解が表明されている。つまり、当該地方政府との間で書面形式の約束を行う上でただ一人の住民指導者が求められているような場合には、その際には当該住民指導者は、公務員としての資格を備えているべきである。

10ヵ村が水没することのほかに、このプロジェクトによってはまた、パダンとアカンバルを結ぶおよそ49キロメートルの国道と州道が失われることになるであろう。「本年には、代替道路の一部が完工される予定である。それ故、本格的なダム建設工事が開始される時点においては、西スマトラ州とリアウ州を結ぶ陸上交通網が不通になるようなことはない」と、コトパンジャン水力発電プロジェクトの技師長のトゥンジュン・ウィチャックソノ氏は言う。

OECDによって充足を求められている前提条件は、一般的なものではない。Oda氏自身、それが、インドネシアに対して初めて適用されたものであることを認めている。Oda氏によれば、OECDの融資姿勢は、中部ジャワ州でのクドゥン・オンボ・ダム問題の惨事により触発されている。この問題

は、今日に至るまで、未だ解決していないのである。「OE C Fの融資姿勢は、不変のものではなく、住民意識の高まりに応じて変わり得るのである。つまり、住民意識の高まりという脈絡においては、環境的および社会的な問題を考慮に容れなければならないのである」というのが、Oda氏の説明である。

「OE C Fとしては、いずれの建設プロジェクトであれ、それへの借款の供与にあたっては、その際の考慮事項として、居住事情、環境および住民移転といった問題を含めることの必要があると認識している。建設プロジェクトの実施にあたっては、犠牲者が出るのが普通である。私達は、このような犠牲者に配慮しなければならないのである」と、Oda氏は言う。

それ故、現地の地方政府は、この問題への対処に、忍耐強く、かつ真剣に取り掛かっている。当初のスケジュール表からは、およそ2ヵ月の遅れであるが、地方政府とPLNは、過去2月以来、すでに各々の世帯から署名を集め始めている。「今日、彼等の署名は、すでに我々の手中にある」と、PLNの西スマトラ州／リアウ州の発電／送電担当責任者のシャリル・アミル氏は言う。「私見では、我々の誰も、クドゥン・オンボ・ダムの問題が、再び繰り返されるようなことを望んではいない」と、シャリル・アミル氏は付言する。

シャリル・アミル氏の目算では、財産目録の作成は、今後4月までには終わることができる。そのため、4月中旬には、カンバル県の8ヵ村の住民代表との間で会議を開催する計画である。この会議では、補償基準が決定されることになる。他方において、リマプル・コタ県の2ヵ村の代表との間の会議は、今後5月5日に招集される予定である。

コトパンジャン水力発電プロジェクトの技師長のトゥンジュン・ウィチャックソノ氏は、「このプロジェクトの建設過程においては、住民の溺死事故が発生するようなことはない」と言明する。同氏はまた、「我々は、補償についての話し合いを持つとともに、公開的な方法で金額処理を行うよう努めるつもりである」とも言う。今後合意される予定の補償金については、「権利所有者に対して、直接に支払われるであろう」と言う。

ダム建設の影響を受けるのは、住民だけではない。この地域に生息する30頭の象の移転もまた、直ちに実施されなければならないであろう。「捕獲象は、リアウ州ドゥリのスバング象訓練所の近くにある新たな生息地、つまりギアム・シアク保護区に移転されるであろう」と、シャリル・アミル氏は言う。

幸いにも、OE C Fの側では、この問題の解決時期を限っていない。Oda氏の説明によれば、今日までの段階では、OE C Fは、この問題の解決のための「実施機関」であることを主張するつもりはない。「我々としては、この問題が、いつまでに解決されなければならないというような目標を持っているわけではない。我々としては、単にPLNからの『進捗報告書』を待っているだけである」と、Oda氏は言う。

今後、再定住問題が解決できず、また住民の移転同意の署名が得られない場合には、どうなるのであろうか？ 当該援助資金は、予定通りに、はたして支出されるのであろうか？ 「現時点では、その質問に答えるのは難しい。私としては、どうなるのか判らない」というのが、その回答である。

インドネシア政府は、OE C Fとの間で、すでに長期にわたって協力関係を築き上げてきている。今日までに、インドネシア政府は、電化、運輸、通信、農業、漁業、および給水の分野において、この融資機関からの借款を利用してきている。OE C Fの『年次報告書』によれば、電力部門では、インドネシアにおける電力施設能力全体の31%が、この融資機関からの借入れである。OE C Fによる融

資総額のうちの14%が高速道路向けであり、また総額のうちの19%が、大型道路の建設向けである。

Katsuki Oda氏によれば、OECDによる援助プロジェクト全体のうちでも、コトパンジャン水力発電プロジェクトのようなケース、つまり融資資金の支出が延期されたケースは、過去においては、未だ経験がないとのことである。「この問題は、我々が初めて経験した問題である」とのことである。このOECDの「圧力」により、コトパンジャン・ダムによる立ち退き住民が、中部ジャワ州のクドゥン・オンボ・ダムによる立ち退き住民と同様な難渋の経験を繰り返さないよう願うばかりである。